

GRATIS
TANPA IURAN

EDISI RABU
16 AGT 2023



**WULING LUNCURKAN AIR EV LITE,
INCAR FIRST BUYER MOBIL LISTRIK
BACA HALAMAN 3**



**260 PERUSAHAAN SAMPAIKAN
SURAT MINAT INVESTASI DI IKN**

BACA HALAMAN 2



260 PERUSAHAAN SAMPAIKAN SURAT MINAT INVESTASI DI IKN

JAKARTA - Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono mengungkapkan bahwa sampai saat ini terdapat 260 perusahaan yang menyampaikan surat minat untuk berinvestasi di IKN.

"Kalau dari segi prospek, bisa dilihat dari saat ini sudah ada 260 lebih perusahaan yang menyampaikan surat minat. Dari sekian banyak itu, juga sudah tujuh perusahaan yang sampai pada fase kesepakatan komitmen. Contohnya Ciputra (Group) salah satunya, komitmen untuk investasi dan bangun, sekarang fasenya adalah penetapan lahan dan harganya," kata Agung, usai diskusi bertajuk "Peluang Kolaborasi di Ibu Kota Nusantara" pada acara Indonesia Retail Summit 2023, di Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Tujuh perusahaan tersebut, yakni Pakuwon Group, Jakarta International School (JIS), Rumah Sakit Hermina, Ciputra Group, PT PP (Persero), Jambuluwuk Hotel and Resorts, dan Vasanta Inopark.

Ia juga mengungkapkan bahwa tujuh perusahaan tersebut 90 persen sudah sepakat untuk berinvestasi di IKN. Kendati demikian, ia enggan menjelaskan lebih lanjut nilai dari investasi tersebut.

"Tentu kalau bicara investasi tergantung dari satu luas lahannya dan juga mengenai investasi dari bangunannya, teknologinya. Ini kalau luas lahannya tentu bermacam-macam, tergantung peruntukannya. Namun, kami bisa katakan ada investor yang sudah siap untuk bangun sampai dengan nilai Rp8 triliun-Rp10 triliun, itu dari luas tanahnya saja. Itu salah satunya hanya dari luas tanahnya. Itu belum dia bangun dari fasilitasnya," kata Agung lagi.

"Jadi, IKN ini kan ada fasilitas infrastruktur dibangun pemerintah dengan APBN, ada juga yang dibangun oleh swasta. Ada satu konsorsium investor sudah komit dia bangun Rp1 triliun, itu fasilitas yang ada akan dibangun oleh mereka tanpa negara keluar uang, jadi macam-macam nilainya," katanya pula.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pembangunan di IKN tidak hanya diperuntukkan kawasan pemerintahan saja, namun juga sebagai pusat ekonomi baru.

"Jadi, di IKN memang ada kota pemerintahan sebagai kawasan inti pusat pemerintahan atau kami menyebutnya core government KIPP (kawasan inti pusat pemerintahan). Namun,

IKN itu bukan hanya KIPP mungkin hanya sekitar 6.000 hektare tetapi totalnya IKN itu kan hampir 260.000 hektare. Selain KIPP, ada kawasan financial center ada kawasan education, ada kawasan renewable energy, ada kawasan industri, agro, logistik, dan lain sebagainya. Kalau dilihat total ada sembilan klaster ekonomi yang tentunya ini semua jadi peluang," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa pembangunan IKN tersebut sering dibandingkan pemindahan ibu kota di Malaysia dan juga Australia. Namun, ia mengharapkan bisa lebih dari itu.

"Ini nanti kayak di Malaysia ada di Putrajaya atau di Australia ada Canberra. Kami selalu katakan yang KIPP tadi itu boleh dibilang Canberra tetapi kami akan membuat ini bukan hanya Canberra, bulan lalu Pak Presiden ke China dan kemudian berkunjung ke Shenzhen, kami melihatnya IKN itu adalah it's Canberra at the core but it's Shenzhen at the surrounding atau Singapore at the surrounding atau Dubai at the surrounding, karena apa? Shenzhen itu dulu kampung nelayan, Dubai itu padang pasir tetapi sekarang jadi pusat ekonomi yang luar biasa," ujar Agung pula. (Ant/MK)



**Pemilu
2024 diikuti
17 parpol
nasional
dan enam
parpol lokal
Aceh.**

514 BAWASLU ALAMI KEKOSONGAN JABATAN, HASIL PEMILU BERPOTENSI DIGUGAT

KORANUSANTARA – Pengu-
muman hasil seleksi anggota
Badan Pengawas Pemilu (Bawas-
lu) kabupaten/kota se-Indonesia
molor lagi. Awalnya, jadwal peng-
umuman lima anggota terpilih
dilaksanakan Sabtu (12/8). Kemu-
dian, pelantikan digelar serentak
Senin (14/8).

Namun, dalam surat edaran
terbaru yang ditandatangani
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bag-
ja, pengumuman dan pelantikan
akan dilaksanakan pada 16–20
Agustus. Padahal, masa jabatan
Bawaslu kabupaten/kota se-In-
donesia telah berakhir kemarin.
Artinya, ada kekosongan beberpa
hari. Tak pelak, situasi tersebut
mendapat sorotan dari sejumlah
pihak.

Direktur Democracy and Elec-
toral Empowerment Partnership
(DEEP) Neni Nur Hayati men-
ilai kekosongan jabatan di 514
Bawaslu kabupaten/ kota dapat
memicu turunnya kepercayaan
publik terhadap lembaga penga-
was pemilu tersebut.

“Saya khawatir dengan adan-
ya kekosongan jabatan berpo-
tensi meruntuhkan kepercayaan
publik kepada pengawas pemi-
lu, karena publik menaruh ke-
curigaan terhadap kredibilitas

penyelenggara apalagi diper-
parah dengan kondisi minimnya
transparansi dan akuntabilitas
saat proses seleksi berlangsung,”
kata Neni dalam keterangan ter-
tuliskan yang diterima di Jakarta, Se-
lasa, 15 Agustus 2023.

Neni menyayangkan jadwal
pengumuman yang sudah dua
kali mengalami keterlambatan
dari jadwal awal. Dia menduga
ada kepentingan politik dan in-
tervensi dari berbagai pihak atas
mundurnya pengumuman di 514
Bawaslu kabupaten dan kota itu.

“Seharusnya, pengumuman
hasil seleksi tidak menyimpang
dari jadwal yang telah ditetap-
kan. Sudah dua kali keterlam-
batan pengumuman hasil ini ter-
jadi. Sebelumnya pengumuman
molor di tim seleksi,” katanya.

Menurut dia, hasil pengumu-
man Bawaslu tidak akan men-
galami keterlambatan apabila
proses seleksi penyelenggara
pemilu di daerah kredibel mulai
dari tim seleksi. Sebab, kehad-
iran para pengawas di daerah
itu mendesak karena tahapan
pemilu memasuki fase krusial,
yakni penetapan daftar caleg
sementara (DCS) yang memer-
lukan pengawasan ketat dan
melekat karena dapat berim-

plikasi pada legitimasi proses
penyelenggaraan pemilu.

Advokat kepemiluan Sri Su-
geng menyatakan, kekosongan
anggota Bawaslu di 514 kabupa-
ten/kota berpotensi terjadi gugat-
tan dari pihak tertentu.

Boleh saja pengawasan itu se-
mentara dilimpahkan ke Bawas-
lu provinsi. Namun, sangat tidak
mungkin dapat melakukan pen-
gawasan dengan baik. Di Jatim,
misalnya. “Masak tujuh orang
bisa mengawasi 38 kabupaten/
kota?” ucapnya.

Dia khawatir, kelak ada pi-
hak-pihak yang menggugat
kondisi kekosongan Bawaslu
tersebut. Kemudian, dapat ber-
implikasi terhadap keabsahan
hasil dari Pemilu 2024. Baik itu
pileg maupun pilpres. “Karena
terdapat celah hukum,” papar
Sugeng.

Anggota Bawaslu Kabupa-
ten Sleman, Jawa Tengah, Arjuna
Al Ichsan Siregar membenarkan
bahwa pengumuman hasil seleksi
belum didapatkan. Soal kekoson-
gan kepemimpinan, dia menye-
but sudah ada upaya antisipasi
melalui supervisi. “Untuk semen-
tara, kepemimpinan Bawaslu ka-
bupaten/kota diambil alih Bawas-
lu provinsi,” tuturnya.*



WULING LUNCURKAN AIR EV LITE, INCAR FIRST BUYER MOBIL LISTRIK

KORANUSANTARA - Wuling semakin agresif menyasar market kendaraan listrik (EV) di segmen entry level dan first buyer. Pabrik asal Tiongkok itu merilis varian Air ev dengan banderol di bawah Rp 200 juta setelah mendapatkan subsidi. Produk tersebut diproyeksikan meningkatkan penyerapan mobil listrik tanah air.

Brand & Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani menyatakan, sebagai salah satu produsen kendaraan listrik di RI, pihaknya melihat tren EV yang meningkat menjadi peluang untuk menghadirkan produk yang mudah dijangkau siapa saja. Serta, dapat digunakan untuk berbagai keperluan.

"Hal tersebut mendasari Wuling dalam meluncurkan varian terbaru Air ev Lite guna menjawab kebutuhan akan mobil listrik. Serta, dapat menjangkau

lebih banyak konsumen dari berbagai wilayah di Indonesia," ujar Dian di sela-sela peluncuran Wuling Air ev Lite di GIIAS.

Air ev Lite tidak memiliki banyak perbedaan secara tampilan dan baterai. Yang beda adalah fitur voice command berbahasa Indonesia yang tidak terdapat pada varian itu. Perihal kemampuan jelajahnya, Air ev Lite masih mengusung baterai Lithium Ferro-Phosphate berkapasitas 18 kWh yang berkompetensi untuk dikendarai hingga 200 kilometer saat terisi penuh.

Dengan hadirnya Air ev Lite, secara keseluruhan mobil listrik pertama Wuling di Indonesia itu memiliki tiga varian, yang terdiri atas Long Range, Standard Range, dan Lite. Seluruh varian tersebut diproduksi di pabrik Cikarang, Jawa Barat.

Isu harga di mobil listrik memang sering dianggap jadi ken-

dala untuk masyarakat dapat mengadopsi kendaraan jenis tersebut. Namun, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) meyakini bahwa secara bertahap harga mobil listrik akan turun. "Mudah-mudahan bisa turun terus karena teknologi berkembang terus," ujar Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi.

Bukan hanya harga, masalah komponen kendaraan listrik juga disebut sebagai kendala produksi dan pasar mobil listrik di RI. Nangoi menilai perlu ada lokalisasi komponen untuk memangkas harga mobil listrik. "Sementara pasar untuk mobil listrik di Indonesia masih kecil. Jadi, kita bekerja sama dengan pabrikan-pabrikan besar seperti Toyota, Wuling, Hyundai, atau lainnya untuk ambil bagian paket untuk dirakit di sini," ujarnya. (*)



PRIMA DIPASTIKAN GAGAL JADI PESERTA PEMILU

KORANUSANTARA – Keinginan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) untuk menjadi peserta Pemilu 2024 dipastikan kandas. Upaya hukum terakhir melalui peninjauan kembali (PK) sudah diputus tolak oleh Mahkamah Agung (MA) pada 8 Agustus 2023.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengapresiasi putusan MA tersebut. Putusan itu menunjukkan MA konsisten dengan regulasi yang ada. Bahwa, gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap pejabat/lembaga pemerintahan bukan wewenang peradilan umum. "Melainkan menjadi wewenang PTUN," jelasnya.

Sebelumnya, Prima sempat membuat heboh perpolitikan nasional. Sebab, gugatan tingkat pertama terhadap KPU di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dikabulkan. Bahkan, PN Jakarta Pusat memerintahkan untuk menunda tahapan Pemilu 2024. Pada tahap banding, putusan itu dianulir Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Lalu, Prima mengajukan PK ke MA.

Jubir DPP Prima Farhan Abdillah Dalimunthe mengatakan, permohonan PK itu hanya salah satu dari beberapa upaya hukum yang ditempuh. Sejak awal, pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah hukum yang dapat

digunakan untuk membuktikan kecurangan dalam proses verifikasi parpol. "Walaupun permohonan PK ditolak, Prima masih punya amunisi lain dalam menggugat KPU," ujarnya.

Dia menegaskan, jalan keadilan masih bisa ditegakkan. Yang terpenting, majelis hakim MA dapat memutus perkara Prima dengan objektif tanpa intervensi kekuatan politik mana pun. Farhan menyebut, tidak lolosnya Prima bukan karena tidak siap menjadi peserta Pemilu 2024. Namun, dia menuding ada intervensi politik dari pihak yang merasa kenyamanannya terganggu jika Prima ikut menjadi peserta pemilu. (*)



MEDIA KALTIM PARTNERSHIP
TRIP KE WAGUB HADI MULYADI

DARI 'REUNI' HINGGA KLIEN PERTAMA

BACA HALAMAN 15

Koran DIGITAL



Lebih Dekat dengan Satu Klik

RABU, 16 AGUSTUS 2023



TERVERIFIKASI
DEWANPERS

PASANG IKLAN HUBUNGI
0811 5405 033

ISMAIL THOMAS TERSANGKA PEMALSUAN DOKUMEN TAMBANG

BACA HALAMAN 2-4





ISTIMEWA

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menetapkan anggota Komisi I DPR RI Ismail Thomas (pakai rompi) sebagai tersangka pemalsuan dokumen lahan tambang di Kutai Barat, Kalimantan Timur, dan langsung dilakukan penahanan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung, Selasa (15/8/2023).

JAKARTA - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Selasa, menetapkan Ismail Thomas, anggota Komisi I DPR RI, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen terkait tambang.

Selain ditetapkan sebagai tersangka, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap Ismail Thomas di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan terhitung dari tanggal 15 Agustus sampai 3 September 2023.

"Bahwa pada hari ini, Selasa, 15 Agustus 2023, tim Penyidik Kejaksaan Agung Jampidsus telah melakukan penetapan status tersangka dan sekaligus penahanan terhadap tersangka dengan inisial IT, anggota Komisi I DPR RI atau Bupati Kutai Barat periode 2006-2016," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana di Gedung Bundar, Jakarta, Selasa (15/8/2023) malam.

Ketut menjelaskan Ismail Thomas ditetapkan sebagai tersangka atas perannya dalam perkara pemal-

suan dokumen-dokumen terkait perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan persidangan.

"Ini terkait dengan perkara PT Sendawar Jaya. Jadi, posisi kasusnya tadi," ujar Ketut.

Pada pertengahan Juni 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum PT Sendawar Jaya terhadap PT Gunung Bara Utama, perusahaan terpidana kasus korupsi Jiwasraya dan Asabri Heru Hidayat, dan Kejaksaan Agung.

Gugatan tersebut terkait sengketa lahan pertambangan batu bara di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, seluas 5.350 hektare yang diklaim milik PT Sandawar Jaya.

Ketut menyebut pada tahap pertama kasus ini, Kejaksaan Agung dinyatakan kalah (diminta untuk mengosongkan lahan), namun setelah melakukan upaya banding dinyatakan menang.

Dari upaya ini, terungkap bahwa dokumen-dokumen yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan adalah palsu. Ismail Thomas disangkakan melakukan pemalsuan dokumen bersama satu pihak lain yang belum ditetapkan sebagai tersangka untuk memenangkan suatu perkara.

“Jadi, proses beliau ini adalah dengan orang lain, yang belum ditetapkan tersangka sehingga kami persangkakan juga pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Melakukan pemalsuan dokumen untuk kepentingan proses persidangan,” kata Ketut.

Selain itu, penyidik juga mempersangkakan Ismail Thomas dengan Pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ketut enggan merinci apa saja dokumen-dokumen yang dipalsukan oleh tersangka karena proses penyidikan sedang berjalan.

Ia juga menegaskan kasus tersebut bukan perkara baru, tetapi sudah lama berjalan terkait dengan Heru Hidayat, terpidana kasus Jiwasraya dan Asabri. Diketahui dalam amar putu-

san perkara Nomor 667/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, majelis hakim PN Jaksel mengabulkan gugatan PT Sendawar Jaya atas kepemilikan lahan tambang batu bara sekitar 5.350 hektare di Kutai Barat, Kaltim.

Dalam amar putusan tersebut, majelis hakim menyatakan PT Sendawar Jaya merupakan pemilik yang sah atas lahan/lokasi pertambangan batu bara seluas 5.350 hektare di Kutai Barat. Selain itu, menghukum tergugat I atau perusahaan Heru Hidayat dan pihak-pihak yang menguasai lahan agar mengosongkan dan menyerahkan kepada penggugat. (Ant/MK)

Pewarta : Laily Rahmawaty
Editor : Didik Kusbiantoro



Harta Ismail Thomas Tersangka Kasus Tambang Tercatat Rp 9,8 Miliar

JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Ismail Thomas yang ditetapkan tersangka kasus pemalsuan dokumen terkait tambang oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) melaporkan kepemilikan harta sebesar Rp 9,8 miliar.

Berdasarkan data yang tertulis di laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, politikus dapil Kalimantan Timur (Kaltim) ini baru melaporkan terkait data harta kekayaannya tersebut pada 4 Juli 2023 lalu.

Adapun beberapa rincian harta yang dilaporkan Ismail Thomas. Yak-

ni, tujuh bidang tanah dan bangunan senilai Rp 2,2 miliar yang tersebar di Kutai Barat dan Samarinda. Satu di antaranya berstatus sebagai hibah dengan akta.

Kemudian, Ismail juga menyantumkan kepemilikan 8 unit kendaraan yang nilai totalnya mencapai Rp 828 juta. Kendaraan milik pribadinya tersebut bermerek Toyota Prado, Mercedes-Benz Micro Bus, hingga Toyota Land Cruiser.

Selain itu mengenai harta bergerak lainnya, dalam LHKPN KPK mencatat sejumlah kas senilai Rp 381 juta dan setara kas Rp 6,3 miliar. Sehing-

ga, total nilai harga kekayaan Ismail Thomas secara keseluruhan tercatat Rp 9,8 miliar.

Diketahui, Ismail Thomas yang merupakan anggota Komisi I DPR RI ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen terkait tambang.

Selain ditetapkan sebagai tersangka, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap Ismail Thomas di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejagung terhitung dari tanggal 15 Agustus sampai 3 September 2023. (cha)

Resmi Jadi Tersangka, Ismail Thomas Dikirim ke Rutan Salemba

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) baru saja menetapkan tersangka kepada Anggota Komisi I DPR RI, Ismail Thomas atas dugaan tindak pidana kasus pemalsuan dokumen tambang. Dengan adanya penetapan tersangka tersebut, Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung langsung melakukan penahanan terhadap Ismail Thomas pada Selasa (15/8/2023).

Berdasarkan informasi yang disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hu-

kum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, legislator dapil Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut langsung dibawakan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba cabang Kejagung terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2023 hingga 3 September 2023.

"Bahwa pada hari ini, Selasa, 15 Agustus 2023, tim Penyidik Kejaksaan Agung Jampidsus telah melakukan penetapan status tersangka dan sekaligus penahanan terhadap tersangka dengan inisial IT,

anggota Komisi I DPR RI atau Bupati Kutai Barat periode 2006-2016," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana di Gedung Bundar, Jakarta, Selasa (15/8/2023) malam.

Sekadar diketahui, penahanan terhadap Ismail Thomas ini terkait dengan dugaan korupsi penerbitan dokumen perjanjian pertambangan Sendawar Jaya. "(Tersangka) dikenakan Pasal 9 UU tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," ucapnya. (cha)

Grand Kartika HOTEL

Paket Maksimal Karyawan

(Makan Siang Hemat Lengkap Untuk Karyawan)

Paket Ber2 Rp **90rb** nett /pax

Paket Ber3 Rp **130rb** nett /pax

FREE Ice Tea

Pilihan 7 Menu Khas Nusantara

- 1 Ikan Dori Saus Telur Asin
- 2 Ikan Dori Asam Manis
- 3 Ayam Geprek Cabe Hijau
- 4 Ayam Bakar Taliwang
- 5 Rendang Daging Padang
- 6 Ikan Nila Masak Tauco
- 7 Ikan Nila Goreng Colo-Colo

FREE 1 pax comp. Light Meal

www.hotelgrandkartika.com



Gubernur Kaltim Ingatkan Baznas Daerah Tidak Korupsi Dana Umat

BONTANG - Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Isran Noor mengingatkan kepada para pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di daerah untuk menghindari tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana titipan umat.

"Kepada pengurus Baznas Provinsi dan Kabupaten dan Kota saya ingatkan jangan korupsi, Rejeki itu takdir. Banyak sedikit itu nasib. Kita tidak tahu, tapi bisa diusahakan," pesan Gubernur Isran Noor di Bontang Senin (14/8/2023) malam.

Pada kesempatan itu Gubernur Isran membuka Rapat Koordinasi Daerah 2023 Baznas Se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu berpesan agar pengurus tidak hanya berpikir untuk mencari honor atau gaji. "Jangan belum berbuat banyak sudah minta honor," pesan Gubernur lagi.

Menurutnya, setiap perbuatan baik, godaannya pasti akan semakin kuat. Demikian juga para pengurus Baznas

yang menggalang dana zakat, infaq dan sedekah untuk membantu para mustahiq. "Ibarat jalan mulus tersiram oli, licin, menikung lagi. Pasti telungsur. Makanya, sekarang pelan-pelan kita perbaiki Baznas," tegas Gubernur.

Kerja semua elemen Baznas menurut Gubernur sangat mulia. Sebab lembaga ini memiliki kontribusi besar membantu pemerintah menurunkan angka kemiskinan yang saat ini masih 6,3 persen di Kaltim.

Ketua Baznas Provinsi Kaltim Ahmad Nabhan menegaskan komitmen organisasi yang dia pimpin untuk membantu pemerintah mengurangi angka kemiskinan dan stunting.

Untuk bidang kesehatan telah dilakukan bakti sosial operasi bibir sumbing dan langit-langit untuk 40 anak dengan nilai Rp485 juta. Kemudian penanganan stunting sebanyak 400 anak dengan alokasi Rp1,08 miliar.

Di bidang kemanusiaan, telah dilakukan rehab rumah tidak layak huni milik 32 mustahiq dengan nilai Rp1,3 miliar.

Selain itu, pertengahan September 2023 akan diresmikan Rumah Sehat Baznas di Berau, bantuan dari PT Berau Coal.

Baznas Kaltim juga memberikan apresiasi tinggi atas perhatian besar Gubernur Isran Noor, salah satunya sebagai satu-satunya gubernur di Indonesia yang mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Hak Keuangan Baznas. "Terima kasih atas perhatian Pak Gubernur kepada Baznas," ujai Ahmad Nabha

Pujian lain juga datang dari Ketua Baznas RI Prof Noor Achmad yang cukup peduli dengan keberadaan Baznas di daerah "Semangat Pak Gubernur sangat luar biasa untuk Baznas," ujar Noor Achmad.

Rakor diikuti 95 peserta dari seluruh Kaltim dan Kaltara dengan mengusung tema "Memperkuat Baznas sebagai lembaga utama menyejahterakan umat". (adv/diskominfokaltim)



Gubernur Kaltara Melesat Menuju Krayan dengan Mengendari Motor

MALINAU - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum memulai langkah perjalanan menuju daerah perbatasan Krayan mengendari motor.

Gubernur Kaltara tiba di Bandara RA Bessing, Kabupaten Malinau setelah menyelesaikan perjalanan udara dari Tarakan pukul 10.40 Wita.

Penampilannya mencuri perhatian, Zainal-sapaan akrab Gubernur Kaltara itu terlihat santai mengenakan jaket hitam dengan kaos hijau berkerah.

Agenda safari ini dilakukan men-

jelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 2023. Acara puncaknya yakni melaksanakan upacara HUT ke-78 RI di Krayan yang berbatasan dengan Malaysia.

Rombongan ekspedisi yang dipimpin Gubernur Kaltara akan meluncur menempuh perjalanan menantang dari Malinau menuju Krayan (Long Bawan) dengan rute jalur darat yang panjang, mencapai jarak sekitar 182,6 kilometer.

Perjalanan epik ini dijadwalkan akan berakhir pada Rabu, (16/8/2023)

menjelang sore. Rombongan ini tidak hanya akan mengatasi tantangan medan yang beragam, tetapi juga menghadapi cuaca yang bisa berubah-ubah.

Dengan mengendarai motor, Zainal ingin memastikan langsung konektivitas dan perkembangan pembangunan jalan di wilayah Kaltara menuju perbatasan.

"Mohon doanya saja. Semoga perjalanan nanti lancar. Tidak ada kendala di lapangan," ungkap Gubernur Kaltara Zainal Paliwang, Senin (14/8/2023). (dkisp)



YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

Pembukaan Rakor daerah Baznas di Kota Bontang oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor.

Rakor Daerah Baznas di Bontang, Basri Akan Terus Koordinasi dengan Baznas

BONTANG – Baznas se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) 2023 Baznas Senin-Rabu (14-16/8/2023) di Kota Bontang. Rakorda 2023 dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dan kegiatan program baik di Baznas Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Ketua Baznas Provinsi Kaltim, Ahmad Nabhan mengatakan Rakor dilaksanakan pada 2 hari ke depan. Melalui Rakor ini, Baznas dapat melakukan penyaluran Baznas se-Kaltim dan se-Kaltara. Ahmad mengatakan Rakor juga akan memperkuat lembaga zakat Baznas dalam menyalurkan dan mendapatkan zakat Baznas, 1,3 Milyar dalam satu tahun.

"Membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dari bidang kesehatan, bidang kemanusiaan, dan

bidang sosial," kata Ahmad Nabhan.

Selain itu, Ahmad mengatakan untuk wilayah Kalimantan Timur, Gubernur telah menjalankan peraturan dalam hal penggunaan Baznas.

Wali Kota Bontang, Basri Rase mengatakan pengurus Baznas Bontang akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kota Bontang saat menjadi tuan rumah Rakor. Dimana Baznas telah memiliki fungsi, tugas dan perannya bagi umat atau masyarakat. Pemkot Bontang akan terus berkolaborasi dengan Baznas Bontang seperti pemberian rantang kasih di Kota Bontang.

Basri menambahkan tantangan pada Baznas masih rendahnya pembayaran zakat ke Baznas dari masyarakat. "Masih rendahnya masyarakat ke Baznas. Namun Pemkot Bontang telah mendorong pegawai

dalam membayar zakat di Baznas," kata Basri Rase, Senin (14/8/2023).

Sementara Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor mengatakan selamat atas pelaksanaan Rakorda 2023 di Bontang. Semoga Rakorda dapat menghasilkan keputusan mudah diterapkan kepada masyarakat.

"Persoalan kewajiban baik yang memberi dan menerima sama," kata Isran Noor saat pembukaan Rakorda.

Isran menambahkan aturan mengenai zakat sudah ada dalam agama. Maka ditambah dengan peraturan di pemerintah seperti undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

"Mengambil amanah dalam kepengurusan Baznas. Ini merupakan amanah undang-undang 23 tahun 2011. Artinya orang-orang Baznas ini adalah ahli surga," sebutnya. (adv/yah)



Komisi III DPRD Balikpapan melakukan sidak drainase di kawasan jalan Wolter Monginsidi RT 31 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat.

Komisi III DPRD Balikpapan Sidak Perbaikan Drainase di Baru Ulu

BALIKPAPAN - Komisi III DPRD Kota Balikpapan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di proyek peninggian jalan dan drainase, Senin (14/8/2023) kemarin.

Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan warga jalan Wolter Monginsidi RT 31 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat terkait proyek peningkatan peninggian badan jalan dan drainase yang dikerjakan PT Azka Jaya Kontruksi yang menggunakan APBD 2023 sebesar Rp 3,8 miliar.

"Adanya laporan pengerjaan yang tidak sesuai dengan prosedur. Drainase yang tengah dibangun keadaannya berbelok," ujar Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Alwi Al Qodri saat di konfirmasi, Selasa (15/8/2023).

Dalam sidak ini Komisi III DPRD Kota Balikpapan juga turut memanggil Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Camat Balikpapan Barat dan perwakilan warga setempat.

Usai meninjau proyek, Alwi menjelaskan, proyek peningkatan badan jalan yang berada di lokasi Jalan Wolter Monginsidi Balikpapan Barat tidak sesuai prosedur dan drainase berbelok dan sempat beberapa hari ini viral di media sosial.

"Adanya keluhan warga, ketebalan jalan, yang mana rumah di sini ada 30-40 tahun agak rendah sehingga waktu dibangun tinggi jalan ini agak mencolok. Pada prinsipnya itu sudah sesuai usulannya," jelasnya.

Menurut Alwi, pembangunan jalan ini merupakan usulan Komisi III, karena adanya teriakan warga mengenai jalan rusak di wilayah ini. Dan akhirnya diusulkan dan diperbaiki tetapi timbul protes warga.

"Untuk ketinggian 30-40 cm, karena di sini kendaraan yang melintas bertonase besar, kalau dibawah akan hancur lagi," tambahnya.

Sementara masalah drainase yang bengkok alias tidak lurus, merupakan

langkah kontraktor yang telah memenuhi pertimbangan.

"Kontraktor ini akan senang sebenarnya kalau mengerjakan drainase lurus, tapi kan ada kendalanya tiang PLN dan pipa PDAM," ujar Alwi lagi.

"Kalau namanya proyek jika masih terlihat amburadul untuk sementara dinilai wajar, hingga proyek ini selesai dikerjakan, sehingga mohon pengertian dari warga sekitar," tambahnya.

Alwi berharap agar masyarakat sekitar bisa terus mendukung proyek tersebut agar cepat rampung. Apalagi Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN), maka dengan adanya pembangunan drainase sebagai kutipan sediaan payung sebelum hujan.

"Memang ini bukan kawasan banjir, tapi pembangunan drainase iniantisipasi tahun kedepannya," tutupnya.

(ADV/DPRDBalikpapan/Bom)



ADY/RADAR KUKAR

Ketua Bapemperda DPRD Kukar, Ahmad Yani.

RDP Bersama Pemkab, 5 Raperda Siap Disahkan DPRD Kukar

TENGGARONG-Pembahasan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) terus berlangsung di DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kukar dengan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar. Untuk membahas 5 buah Raperda, yang mana 3 di antaranya adalah Raperda terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Raperda terkait RTRW tersebut diantaranya Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, Ruang Terbuka Hijau dan Perlindungan Petani dan Nelayan. Selain itu 2 buah Raperda lainnya yang dibahas adalah Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Serta rencana usulan pengajuan Raperda di Luar Program Pembentukan Daerah (Propemperda) Tahun 2023.

Rapat ini dilangsungkan di Ruang

Rapat Banmus DPRD Kukar, pada Senin (14/8/2023) kemarin. Dipimpin oleh Ketua Bapemperda Kukar, Ahmad Yani, beserta anggota, Firnandi Ikhsan.

Pimpinan rapat, Ahmad Yani, menjelaskan. Pembahasan Raperda hari ini merupakan bagian dari persiapan pengesahan. Hanya saja beberapa Perda RTRW masih terkendala di provinsi dan masih perlu kesepakatan pihak eksekutif. Meski secara substansi telah disetujui, namun masih perlu persetujuan eksekutif untuk pengesahannya.

"Juga ada usulan pengajuan raperda di luar Propemperda yang berkaitan dengan pengelolaan sarang burung walet dan kebencanaan. Ini telah dilakukan fasilitasi tinggal menunggu pengesahan. Tetapi karena tidak masuk Propemperda sehingga kita akan masukkan di luar (Propemperda)," kata legislator dari Dapil V tersebut.

Ahmad Yani juga mengatakan, Raperda tentang Perubahan Ketiga

Atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, membahas terkait pemisahan bidang Kebudayaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Raperda pemisahan ini termasuk sebagai urgensi sesuai kesepakatan panitia khusus (pansus). Sehingga ke depannya akan melalui mekanisme tata tertib, terhadap pemisahan bidang kebudayaan untuk mengoptimalkan penganggaran.

Selain kelima Raperda ini, Yani juga mengaku optimis bahwa DPRD Kukar mampu merampungkan pembahasan 24 Raperda lainnya yang ditargetkan tahun ini.

"Kami yakin 24 Raperda, termasuk Perda wajib yang saat ini sudah berjalan 75% dapat disahkan. Dan ke depan kami minta pemerintah daerah ketika pembahasan, revisi, mengambil keputusan di Bapemperda harus dihadiri eksekutif. Kami harap ke depan wajib hadir," tutup Ahmad Yani. (tabs)



ADY/RADAR KUKAR

Sekcab Kukar, Sunggono, bersama Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid dan Wakil Ketua DPRD Kukar, Siswo Cahyono setelah menandatangani dokumen.

DPRD-Pemkab Kukar Sepakat, APBD-P Tembus Rp 11,8 T

TENGGARONG - DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Paripurna ke-15, masa sidang ke III di Ruang rapat paripurna DPRD Kukar, Selasa (15/8/2023).

Rapat kali ini dengan agenda Laporan Badan Anggaran (Banggar) dan kesepakatan bersama terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2023.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, dan dihadiri oleh Sekretaris Kabupaten (Sekcab) Kukar, Sunggono tersebut, disepakati bahwa pada APBD-P Kukar tahun ini mengalami peningkatan

anggaran. Yakni, dari Rp 7,8 triliun menjadi Rp 11,8 triliun atau mengalami peningkatan anggaran sebesar Rp 3 triliun.

Dengan peningkatan anggaran yang terbilang sangat besar ini, Rasid menyampaikan secara langsung kepada Sekcab Sunggono, sebagai pimpinan aparatur pemerintah di Kukar untuk memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap realisasi APBD-P ini. Tujuannya, agar pelaksanaannya bisa dilakukan secara maksimal dan tidak menghasilkan Silpa.

"Tentunya kita berharap kegiatan ini bisa dimaksimalkan. Supaya memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat dan pembangunan

di Kukar," harapnya.

Rasid juga menjelaskan, peningkatan anggaran yang terbilang sangat besar ini, mayoritas bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor migas dan batu bara. Setelah pembahasan ini, ia menuturkan bahwa selanjutnya hasil rapat ini akan diteruskan ke provinsi untuk dilakukan evaluasi.

"Nanti mungkin setelah di evaluasi provinsi ini nanti akan segera kita tetapkan," kata Rasid.

"Target kita bulan ini, kan perubahan ini mepet, intinya kalau bisa secepatnya kita tetapkan. Supaya penyerapannya bisa maksimal," begitu tutupnya. (adv/tabs)



Peduli Kesehatan Lansia di Kelurahan Guntung, PT Kaltim Daya Mandiri Gelar Progam Lansia Sehat

BONTANG-PT Kaltim Daya Mandiri pada Selasa (15/08/2023) bekerja sama dengan Puskesmas Bontang Utara II, Rumah Sakit Amalia dan Kader Lansia Kelurahan Loktuan menggelar Program Lansia Sehat di Kelurahan Guntung.

Kegiatanyangberlangsung di Balai

Pertemuan Umum Kelurahan Guntung meliputi Senam Lansia, Pemeriksaan Kesehatan, dan pemberian Paket Makanan Tambahan (PMT) Bergizi dengan target cakupan 100 orang Lansia di Kelurahan tersebut.

Program Lansia Sehat Mandiri Bahagia bersama PT KDM tahun ini

mengangkat tema Hari Lansia Nasional yaitu "Lansia Sehat, Indonesia Bermartabat". Adapun Pemeriksaan Kesehatan yang dilakukan meliputi Pemeriksaan Asam Urat, Kolesterol, Gula Darah, Mata, Tensi, serta pengukuran Berat Badan dan Tinggi Badan.





Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Perusahaan PT KDM, Sekretaris Kelurahan Loktuan, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Loktuan, serta perwakilan dari Kabag Administrasi & Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Bontang, Kecamatan Bontang Utara dan Dinas Kesehatan Kota Bontang.

Ketua Panitia Dradjad Sarwoadji, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan setiap tahun di wilayah Bufferzone PT Kaltim Daya Mandiri. Sehingga harapannya ke-

giatan ini bisa memberikan dampak yang baik kepada Lansia di Kawasan Bufferzone, Lansia Sehat Bahagia Bersama KDM.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat yang mewakili Dinas Kesehatan Kota Bontang Jamilah Sayuti, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada PT KDM atas kepeduliannya terhadap Lansia di Kota Bontang khususnya yang berada di Kelurahan Guntung. Beliau berharap PT KDM bisa terus berkontribusi terhadap kesehatan di Kota Bontang.

Sementara itu Sekper PT KDM

Sukardi mengatakan, kegiatan CSR tersebut dilakukan terus menerus dan berkesinambungan mengingat sampai dengan saat ini hanya PT KDM yang memberikan perhatian lebih untuk para lansia di Kawasan Bufferzone. Kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk realisasi pilar CSR PT KDM yaitu dibidang Kesehatan.

“Semoga bantuan yang diberikan PT KDM dapat memberikan manfaat yang maksimal bagia Lansia di Kelurahan Loktuan,” ujarnya. (ADV)





Dapatkan diskon 25% pada liburan Anda berikutnya di Asia Pasifik. Anggota Accor Plus menikmati diskon tambahan 10%. Pesan sebelum 21 Agustus untuk menginap hingga 30 November 2023.

*Menginap minimal 2 malam. Syarat & ketentuan berlaku.





TERVERIFIKASI



DEWANPERS

Lebih Banyak Berita **Satu Klik**



WAKIL GUBERNUR KALTIM
HADI MULYADI

**GELORAKAN
PEMBANGUNAN**



ADHI

Hadi Mulyadi saat menerima poster cover e-paper dirinya dari CEO Media Kaltim Group, Agus Susanto.

Media Kaltim Partnership Trip ke Wagub Hadi Mulyadi: Dari 'Reuni' hingga Klien Pertama

SAMARINDA – Partnership trip Media Kaltim Group kali ini berkesempatan mendatangi Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, pada Selasa, (15/8/2023) malam. CEO Media Kaltim Grup, Agus Susanto, dan Manager Area Samarinda sekaligus Direktur Radar Media, Adhi Abdhian, diterima di rumah jabatan Wagub.

Sesi kali ini berlangsung menarik. Tanpa diduga, Media Kaltim turut berkesempatan berbincang dengan Masykur Sarmian, politisi senior dari Komisi II DPRD Kaltim. Karena pernah menjadi pewarta politik dan bertugas di DPRD, Agus Susanto dan Adhi Abdhian merasa seperti 'reuni' dengan kedua tokoh politik senior tersebut.

"Dulu bersama Pak Hadi, saat beliau masih menjadi wakil rakyat, dan Pak Masykur, sering bertemu karena mereka adalah narasumber kompeten saya di desk politik. Seringkali data dan informasi dari mereka menjadi headline di media saya saat itu," ujar Agus.

Ikatan antara Wagub Hadi dan Media Kaltim juga spesial. Hadi Mulyadi merupakan pejabat pertama yang 'percaya' memasang iklan di Media Kaltim saat pertama kali beroperasi. "Kami merasa sangat bangga dan

termotivasi karena mendapat kepercayaan pemasang iklan sekelas wakil gubernur. Tidak hanya sekali, semua penawaran iklan dari Media Kaltim, asalkan momennya sesuai, selalu diterima baik oleh Pak Hadi. Untuk itu, kami sangat berterima kasih," papar Agus.

Wagub Hadi, yang juga gemar menulis, sangat akrab dengan dunia jurnalistik. Salah satu putranya kini meniti karier sebagai jurnalis di salah satu media online kaltimkece.id, jejaring Mediakaltim.com.

"Anak saya lebih fokus pada tulisan berita mendalam dengan penjabaran

yang panjang, melibatkan beberapa narasumber, dan data akurat. Memang, passion dia di dunia tulis menulis sejak SMA," kata Hadi.

Terkait media, Hadi Mulyadi meyakini bahwa media online memiliki peran penting dalam sosialisasi dan pengawalan program pemerintah daerah. Peran Media Kaltim, yang kini hadir dengan e-paper mobile, memberikan banyak pilihan bagi pembaca untuk menikmati informasi akurat. "Semoga Media Kaltim semakin berkembang dan terus berinovasi dalam penyajian beritanya," pungkasnya. (rs1)





Operasi pasar murah Elpiji 3 kg seharga Rp 25 ribu di GOR Pemuda.

Pemkab Berau Salurkan Gas Melon Rp 25 Ribu per Tabung

TANJUNG REDEB - Menyikapi susahny membeli Liquefied Petroleum Gas (LPG) atau Elpiji 3 kg di Kabupaten Berau, Pemkab Berau menggandeng agen penyalur gas melon untuk operasi pasar murah Elpiji 3 Kg selama empat hari, sejak 14-28 Agustus, di Gedung Olahraga (Gor) Pemuda.

Kasubag Bina Perekonomian Setkab Berau, Indah Ariani menegaskan, bahwa tidak ada kelangkaan untuk membeli gas melon di Bumi Batiwakal. Adapun suplai Elpiji 3 kg selama ini sudah mencukupi kebutuhan masyarakat. Yakni diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan UMKM.

Memang diakui, belum lama ini ada sedikit kendala karena kapal yang menuju Kabupaten Berau harus terhenti lantaran cuaca yang tidak mendukung.

"Sehingga proses pengiriman sedikit mengalami keterlambatan. Tapi

saat ini kapal juga sudah datang dan bisa memenuhi kebutuhan," ungkapnya, kemarin (14/8/2023).

Operasi pasar Elpiji 3 kg kali ini pihaknya menyediakan stok sebanyak 1.120 tabung untuk dijual ke masyarakat di Kecamatan Tanjung Redeb. Dengan mengacu harga sesuai SK Bupati Berau dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 25 ribu per tabung. Syaratnya hanya fotokopi KTP sesuai kecamatan.

"Jumlah yang sama juga akan disalurkan ke 3 kecamatan lain. Yakni, Gunung Tabur, Sambaliung dan Teluk Bayur," terangnya.

Ia berharap, operasi pasar murah tersebut mempermudah masyarakat membeli dan mendapatkan gas melon untuk keperluan rumah tangga dan sehari-harinya.

"Kami akui operasi pasar Elpiji 3 Kilogram ini tidak terlalu maksimal. Namun itu menandakan bahwa be-

nar tidak ada kelangkaan yang terjadi pada stok gas LPG tersebut," pungkasnya.

Sementara itu ditemui terpisah, salah seorang masyarakat Kecamatan Tanjung Redeb, Abu Bakar mengungkapkan bahwa dirinya sangat terbantu dengan operasi pasar Elpiji 3 kg ini. Selain karena stoknya melimpah, juga harga yang diberikan jauh lebih murah dari membeli di penampungan yang biasa ia kunjungi.

"Saya sangat terbantu sekali. Stok di pasaran sudah banyak. Jadi lebih baiknya lagi jika pelaksanaan operasi pasar Elpiji 3 kg ini dilaksanakan di waktu terjadi kelangkaan," harapnya. (mnz)

Pewarta: Amnil Izza

Editor: Nicha Ratnasari



Pelatihan media PDAM se-Kaltim dan media lokal Berau, di Kantor Perumda Air Minum Batiwakkal.

PDAM se-Kaltim dan Media Lokal Berau Ikuti Pelatihan Jurnalistik

TANJUNG REDEB - Perusahaan Air Minum Daerah (Perumda) Air Minum Batiwakkal mengadakan pelatihan jurnalistik bagi PDAM se-Kaltim dan media lokal di Kabupaten Berau, di Kantor Perumda Air Minum Batiwakkal, pada Selasa (15/8/2023).

Kegiatan ini diikuti oleh media lokal di Berau dan PDAM se-Kaltim. Sementara, narasumber mendaratkan wartawan senior mantan News Anchor Metro TV dan TV One, Rahma Sarita Aljufri, serta Mantan Manager Program TV One, Doel Y Duantje.

Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal, Saipul Rahman menjelaskan, pihaknya ingin mengkolaborasi kemampuan dasar media dengan PDAM sehingga bisa merumuskan formulasi untuk mencapai tujuan

bersama.

Salah satunya, bagaimana cara menyampaikan pesan yang tepat kepada masyarakat. Kegiatan tersebut juga melibatkan Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia (Perpamsi) Kaltim. Yang mana telah didiskusikan terkait kebutuhan pihaknya untuk menyampaikan pesan terkait PDAM ke masyarakat.

"Kami pernah diskusi di Perpamsi kenapa tidak pernah ada alokasi khusus seperti pendidikan 20 persen dan kesehatan 10 persen dari anggaran daerah. Padahal air sumber kehidupan kita. Saya sampaikan ke Perpamsi, bisa jadi karena ketidakmampuan kami dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Sehingga tidak cukup diperbincang-

kan di tengah masyarakat," jelasnya, Selasa (15/8/2023).

"Makanya kami coba cari siapa narasumber yang menarik untuk berbagi pengalaman di sini bersama PDAM se-Kaltim dan media lokal Berau. Perpamsi setuju dan diperbolehkan," sambungnya.

Saipul berharap dengan pelatihan tersebut Perpamsi Kaltim mampu menyerap basik jurnalistik dari narasumber, terutama dari media lokal Berau.

"Sehingga nanti membantu mereka untuk memahami bagaimana cara menyampaikan pesan secara efektif ke masyarakat," tutupnya. (mnz)

Pewarta: Amnil Izza

Editor : Nicha Ratnasari



Diundang ke Jakarta, Bupati Sri Juniarsih Mas Akan Menerima Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha

TANJUNG REDEB - Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mendapat undangan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, untuk hadir pada pembukaan temu karya nasional dan penganugerahan penghargaan desa dan kelurahan berprestasi tahun 2023 sebagai rangkaian dari kegiatan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Bupati Sri Juniarsih diundang hadir dan akan menerima penghargaan Upakarya Wanua Nugraha Tahun 2023, yang akan digelar di Hotel Discovery Ancol Jakarta, pada Selasa Malam (15/8/2023).

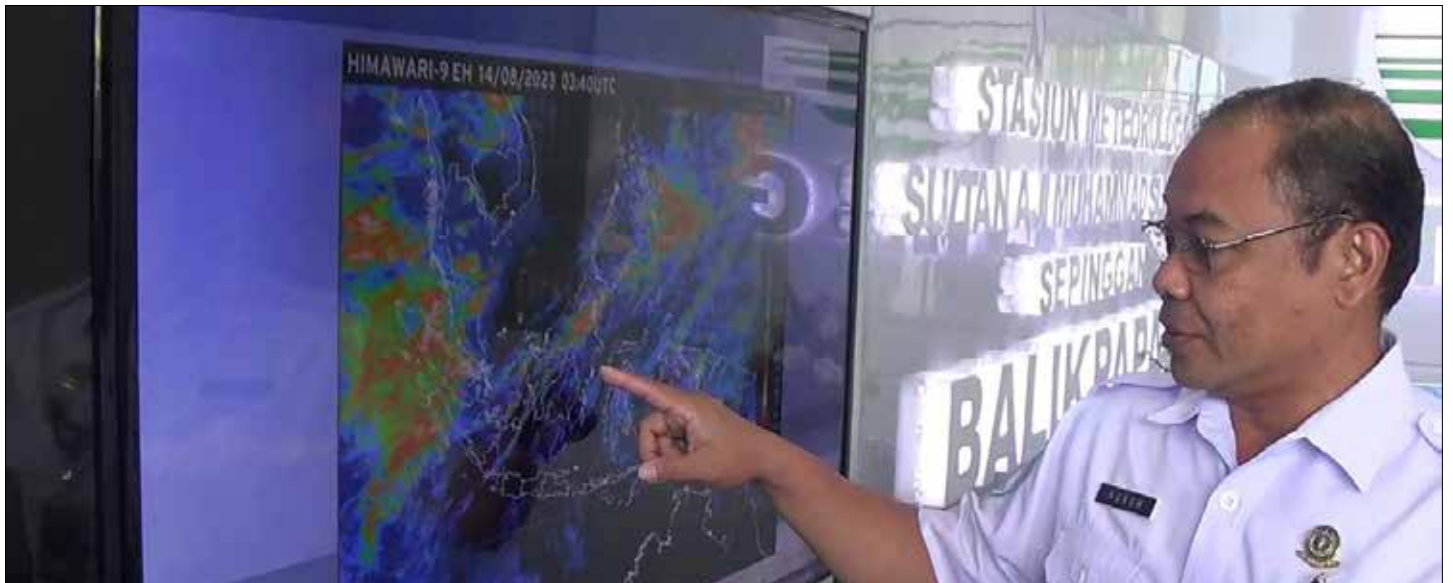
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Berau, Tentram Rahayu, mengatakan undangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI, tertanggal 14 Agustus 2023

telah diterima pihaknya. Undangan tersebut ditujukan kepada tujuh gubernur serta delapan bupati dan wali kota se Indonesia, salah satunya Bupati Berau bersama Wali Kota Balikpapan dan Gubernur Kalimantan Timur. "Sesuai dengan undangan yang Kami terima, Bupati Berau menjadi salah satu penerima penghargaan upakarya wanua nugraha, Ibu Bupati rencana akan hadir langsung," ungkapnya.

Penghargaan ini diberikan kepada kepala daerah sebagai pembina desa sebagai apresiasi oleh Menteri Dalam Negeri atas prestasi dan komitmen dalam memajukan desa dan kelurahan di wilayahnya. Penghargaan upakarya wanua nugraha ini dikatakannya akan menjadi yang kedua kali diterima Bupati Berau, setelah pada tahun 2022 juga diteri-

ma bersama dengan diraihnya juara satu lomba desa yang diraih Kampung Sumber Agung. "Tahun lalu kita menerima dan Alhamdulillah tahun ini ibu bupati diundang untuk menerima penghargaan ini," ucapnya.

Bersamaan dengan ini disampaikan Tentram Rahayu, Kepala Kampung Labanan Makarti yang telah masuk tiga besar lomba desa tingkat nasional juga diundang untuk hadir pada acara ini, sekaligus pengumuman juara dan penyerahan hadiah langsung dari menteri dalam negeri. "Kita optimis Berau kembali meraih juara 1 lomba desa dari regional III, ini seiring dengan kembali diterimanya anugerah upakarya wanua nugraha untuk Bupati Berau," tandasnya. **(RN/Prokopim/dez)**



Kepala BMKG Kota Balikpapan, Kukuh Ribudiyanto saat menjelaskan El Nino Moderate.

BMKG Balikpapan Sebut El Nino Bakal Sampai Oktober

BALIKPAPAN - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kota Balikpapan memprediksi jika El Nino yang saat ini tengah melanda laut Pasifik bakal terjadi hingga bulan Oktober mendatang.

El Nino saat ini masuk kategori Moderate, yang menyebabkan terjadinya peningkatan suhu di permukaan laut Pasifik khususnya di bagian Tengah dan Timur.

Kepala BMKG Kota Balikpapan, Kukuh Ribudiyanto mengatakan, fenomena alami ini menyebabkan

anomali pola cuaca global, yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. "Kondisi ini kita prediksi terjadi hingga Oktober mendatang," ujarnya, Selasa (15/8/2023).

Lebih lanjut Kukuh menjelaskan, BMKG Kota Balikpapan akan terus melakukan pembaharuan data setiap 10 hari ke depan untuk mengetahui kondisi El Nino Moderate tersebut.

"Nanti di awal November baru ada hujan, meskipun memiliki intensitas ringan tapi sudah masuk peralihan

musimnya," jelasnya.

Adapun dampak dari El Nino ini yang paling dirasakan adalah kemarau yang menyebabkan kekeringan. Dan pada tahun ini bisa termasuk kemarau yang berkepanjangan. "Tapi saat ini meski kemarau bukan berarti tidak ada potensi turun hujan. Peluang hujan tetap ada namun masuk kategori hujan lokal dan intensitasnya sangat rendah sekali," tutupnya. **(bom)**

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari

10
09
2023

REUNI

SMK PERTIWI

Angkatan 1997

HOTEL ZURICH BALIKPAPAN

Ada Game seru, Hiburan, Hadiah,
& Doorprize

Only
Rp. 50k

Konfirmasi kehadiran : Masnah

081252119669



BEST TIME TROPHY DAN UANG PEMBINAAN TOTAL HADIAH RATUSAN JUTA RUPIAH



HADIAH UTAMA MOTOR MATIC

26-27 AGUSTUS 2023

SIRKUIT EX BANDARA TEMINDUNG SAMARINDA

CLASS UTAMA 201 M (KEJURPROV)

KELAS POINT

1. DB. 1 - BRACKET 8
2. DB. 2 - BRACKET 9
3. DB. 3 - BRACKET 10
4. DB. 4 - SPORT 2 TAK TUNE UP FRAME STD 155 CC (POINT)

CLASS UTAMA 402 M

1. DB. 22 BIG MATIC 250 - 400 CC TOURING
2. DB. 23 SPORT 250 - 400 CC TOURING
3. DB. 24 FFA SPORT
4. DB. 25 HARLEY NON TOURING SADDLE BAG
5. DB. 26 HARLEY TOURING SADDLE BAG

KELAS SUPPORTING

1. DB. 8 - BEBEK 4 TAK TUNE UP 150 CC
2. DB. 9 - MATIC RANGKA STD INDEKSI 200 CC
3. DB. 10 - SPORT 4 TAK RANGKA STD NON DOHC 300 CC
4. DB. 11 BRACKET 8 DETIK
5. DB. 12 BRACKET 9 DETIK
6. DB. 13 BRACKET 10 DETIK
7. DB. 14 SUNMORI OMB RX KING
8. DB. 15 SUNMORI BEBEK 2 TAK 118 CC
9. DB. 16 SUNMORI BEBEK 2 TAK 125 CC NON BUILD UP
10. DB. 17 SUNMORI BEBEK 2 TAK 130 CC
11. DB. 18 SUNMORI SPORT 2 TAK 155 CC
12. DB. 19 SUNMORI MATIC INDEKSI RANGKA STD 160 CC
13. DB. 20 SUNMORI BEBEK 41T RANGKA STD 150 CC
14. DB. 21 SUNMORI SPORT 4T 150 CC

REGISTRASI PESERTA

KELAS UTAMA

TANGGAL 05 - 15 AGUSTUS : 510 K
TANGGAL 16 - 25 AGUSTUS : 560 K

KELAS SUPPORTING

TANGGAL 05 - 15 AGUSTUS : 410 K
TANGGAL 16 - 25 AGUSTUS : 460 K

KELAS SUNMORI

TANGGAL 05 - 15 AGUSTUS : 360 K
TANGGAL 16 - 25 AGUSTUS : 410 K

LINK PENDAFTARAN :

[HTTPS://LINKTR.EE/DNTIMINGPENDAFTARAN](https://linktr.ee/dntimingpendaftaran)

PRESENT BY :



SUPPORTED BY :



MEDIA PARTNER :



INFORMASI DAN PENDAFTARAN :

EZA : +62 822-5560-6039
MAULIDANI : +62 857-5134-4384
AYA : +62 831-4400-8571

Koran DIGITAL

MEDIA KALTIM.com

Lebih Dekat dengan Satu Klik



<http://koran.mediakaltim.com/>

INFO & PEMASANGAN IKLAN
CP. 0811 5405 033

media_kaltim | mediakaltimdotcom | mediakaltim.com | media kaltim



ISTIMEWA

Proses evakuasi jenazah korban yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan tim kesehatan.

Diduga Dibuang, Jasad Bayi Usia 2 Minggu Ditemukan di Area Pemakaman

TENGGARONG - Warga Kelurahan Sarijaya, Kecamatan Sangasanga, dikejutkan dengan penemuan mayat bayi berjenis kelamin perempuan. Tepatnya di area pemakaman umum yang terletak di RT 9, Kelurahan Sarijaya.

Awalnya, jasad bayi malang tersebut ditemukan pada Selasa (15/8/2023), sekitar pukul 11.30 WITA. Pertama kali ditemukan oleh warga bernama Yasir (41). Saat itu dirinya sedang mengantar jenazah salah satu warga.

Saat melintasi batas tanah pemakaman, ia melihat ada sesuatu

yang mencurigakan dan dikerumuni oleh lalat. Karena merasa curiga, ia pun memberanikan diri untuk mengecek dan melihat. Benar saja, ia menemukan sesosok mayat bayi malang sudah tidak bernyawa lagi.

"Jasad pertama kali ditemukan oleh saudara Yasir, saat berjalan melihat batas tanah pemakaman dan melihat ada sesuatu yang sedang dikerumuni oleh lalat. Kemudian karena merasa penasaran saksi mendekati, dan dikejutkan dengan sosok bayi yang ada dalam keadaan meninggal dunia," terang IPTU Suranto, Kapolsek Sangasanga, Se-

lasa (15/8/2023).

Setelah menerima laporan penemuan jasad bayi tersebut, pihak Kepolisian bersama tim medis langsung menuju TKP untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi. Diperkirakan bayi malang yang baru berusia dua minggu tersebut, telah meninggal sekitar 24 jam sebelum ditemukan.

"Korban ditemukan dalam keadaan diselimuti sarung," pungkasnya. **(tbs)**

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Nicha Ratnasari

TOYOTA LET'S GO BEYOND

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000_bontang —

LET'S TEST DRIVE!

EZ Deal
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

AUTO2000 BONTANG
Jl. Bigas Kencana No. 116A, Sebelang No. Bontang Barat, Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD APLIKASI M-TOYOTA

Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

TOYOTA LET'S GO BEYOND

BOOKING THS SAJA

BTS
di Digiroom

THS Sama Lengkapnya Dengan Bengkel

DAPATKAN GRATIS 1st OLI TMO SYNTETIC SETIAP SERVICE BERKALA*

Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

Kode Promo **BTSOLI**

*Syarat dan ketentuan berlaku

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088

Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

Bontang



Geladi Bersih Upacara HUT RI di Kutim, Persiapan Capai 90 Persen

SANGATTA - Persiapan jelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) tahun 2023 di Lapangan Kantor Bupati Kutai Timur (Kutim) memasuki tahap akhir. Geladi bersih dipimpin langsung oleh Kabag Prokopim Setkab Kutim Basuki Isnawan mewakili Bupati sebagai Inspektur Upacara dan selaku Komandan Upacara adalah AKP Isnan Fatah. Tampak hadir pula Ketua DPRD Joni dan peserta upacara dari siswa-siswi SMP, SMA, TNI-Polri, perwakilan perangkat daerah serta ormas.

Ditemui usai geladi bersih perwira

upacara Kabag OPS Polres Kutim AKP Zainal Arifin mengatakan dalam geladi ini bertujuan mengevaluasi hasil pelatihan yang telah diberikan oleh para instruktur. Sehingga hal-hal yang masih dirasa kurang bisa dilakukan pembenahan secara maksimal. "Alhamdulillah, persiapan ini sudah 90 persen," kata Zainal.

Ia mengatakan sampai saat ini belum mengalami kendala yang signifikan. Karena dengan kerja sama, kekompakan dan semangat dalam memperingati HUT ke-78 Kemerdekaan RI bisa terlaksana dengan lancar. "Dengan semangat, se-

suai dengan perjuangan pendahulu kita," ucapnya.

Ia berharap bersama rekan-rekan Paskibraka Kutim beserta TNI-Polri dapat mengibarkan bendera dengan lancar, aman dan sukses untuk semua. Tanpa ada hal-hal yang menyebabkan kurangnya kekhidmatannya acara.

"Usai pelaksanaan upacara nanti, turut dimeriahkan dengan penampilan polisi cilik di lapangan," tutupnya. (rkt)

Pewarta : Irfan Aditama
Editor : Nicha Ratnasari



Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi menerima surat jawaban.

Mulyani Calon PAW Umar di DPRD Kabupaten Paser

PASER - Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Paser, Umar sisa masa periode 2019-2024 mulai mengemuka. Yakni, Mulyani yang meruokan Plt. Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Paser.

KPU Kabupaten Paser telah menyerahkan surat jawaban ke Ketua DPRD Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi perihal permohonan PAW untuk daerah pemilihan (Dapil) IV. Yakni Kecamatan Pasir Belengkong, Batu Engau dan Tanjung Harapan.

"Setelah kami lakukan klarifikasi calon PAW, nomor urut dengan suara berikutnya Muhyidin tidak memenuhi syarat. Sehingga perolehan suara terbanyak berikutnya atas

nama Mulyani," kata Ketua KPU Kabupaten Paser, Abdul Qayyim Rasyid, Selasa (15/8/2023).

Lanjut Qayyim, dengan telah menyerahkan surat jawaban ke ketua DPRD Paser dalam hal perolehan suara terbanyak berikutnya yang memenuhi syarat. Maka tugas dari KPU telah selesai. "Tahapan selanjutnya di DPRD Paser," jelasnya.

Sementara itu, Hendra Wahyudi menuturkan proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Paser, Umar usai adanya surat dari DPP PBB. "Kami langsung menindaklanjuti terkait surat yang masuk dari DPP PBB," tuturnya.

Biasanya perihal surat PAW diberikan oleh DPC atau paling tidak tingkat provinsi. "Tapi ternyata ini

langsung dari DPP PBB. Point intinya proses PAW Umar karena pindah partai," sebutnya.

Usai menerima surat jawaban dari KPU Paser, pihaknya akan segera meneruskan kepada bupati Paser. Kemudian ke Gubernur dan Kemendagri. "Kalau sudah ada putusan, nanti kami tinggal persiapkan proses PAW," tutup Hendra.

Sekadar diketahui, Umar yang saat ini anggota Komisi III DPRD Kabupaten Paser memilih pindah ke Partai Golkar untuk kembali bertarung pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024 mendatang. (bs)

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



RDP Komisi Gabungan DPRD Kabupaten Paser dengan Perumda Air Minum Tirta Kandilo.

Perkara HP Hilang, Direktur Air Minum Tirta Kandilo Kena Semprot DPRD

PASER - Pendistribusian air bersih belakangan ini dikeluhkan masyarakat. Pasalnya, kualitas air bersih diragukan dan terdapat beberapa wilayah di Kecamatan Tanah Grogot tidak mengalir hingga sepekan.

Keluhan masyarakat itu sampai ke telinga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser. Akibatnya, Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Kandilo, Suryanto Agustono, dipanggil untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Dalam RDP itu, unsur pimpinan di DPRD Kabupaten Paser, yakni Fadly Imawan dan Abdullah mencecar habis-habisan Direktur Perumda Air Minum Tirta Kandilo, di ruang rapat Bapekat Sekretariat DPRD Kabupaten Paser, Selasa (15/8/2023).

Kekesalan lebih dulu dikeluarkan oleh Fadly Imawan. Politikus Partai Golkar itu menyebut direktur Perum-

da Air Minum Tirta Kandilo susah sekali diajak berkomunikasi, khususnya terkait persoalan pendistribusian air bersih di rumah warga.

"Komunikasi via WA (WhatsApp) dan panggilan telepon tidak dirispon. Kami anggota DPRD tentu mewakili keluhan masyarakat, tapi kita saja tak didengar dan direspon, bagaimana dengan masyarakat," ketus Fadly.

Senada, Abdullah juga dibuat kesal dengan sulitnya direktur Perumda Air Minum Tirta Kandilo untuk berkomunikasi via seluler. Bahkan tak segan-segan DPRD Kabupaten Paser memberikan surat teguran atas kinerja dari Suryanto Agustono.

"Ya namanya manusia biasalah ada kekeliruan. Tapi kalau ini berkelanjutan tentu kami akan mengambil solusi. Paling tidak ada surat teguran, setelah itu mengusulkan kepada bupati, kalau tak layak kenapa harus

dilanjutkan," terang Abdullah.

Terlepas dari keluhan yang kesulitan berkomunikasi itu, Abdullah menyebut, diketahui salah satu persoalan tak maksimalnya pelayanan air bersih karena banyaknya pipa-pipa yang rusak, dan belum sepenuhnya telah sampai di rumah warga.

"Salah satu persoalan yang disampaikan bahwa ada pemasangan pipa ke rumah warga banyak mengalami kebocoran. Itulah yang coba diperbaiki," sebut Politikus Partai Demokrat itu.

Suryanto Agustono menyebut adanya daerah-daerah yang mengalami mati air hingga 6 hari. Antara lain, warga Jalan Sultan Khaliluddin Ibrahim, Modang, Ahmad Dahlan, Noto Sunardi, Lambung Mangkurat, Kandilo Bahari, Yos Sudarso dan RA Kartini.

Dikarenakan pipa yang ada saat ini sudah lama dan butuh peremajaan.

“Ada daerah-daerah yang sudah kita petakan. Itu memang wilayah yang pipanya sudah lama. Otomatis itu mengalami tingkat kehilangan air yang sangat tinggi,” katanya.

Dirinya mengatakan sudah perlu dilakukan peremajaan pipa. Hal ini telah disampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Paser. “Ada jaringan pipa itu sejak tahun 1980an. Ini perlu perbaikan atau peremajaan,” tuturnya.

Sementara terkait adanya jaringan pipa air bersih yang belum sampai di rumah warga, hal itu dikatakann-

ya memang belum dilakukan pemasangan. Pasalnya, banyak pipa yang kini mengalami kebocoran.

“Kami takutnya kalau pasang kepada masyarakat yang belum mempunyai jaringan sampai pemasangan baru, nantinya berdampak seperti sekarang ini tidak mendapatkan air bersih. Makanya PDAM membenahi dulu jaringan pipa yang mengalami kebocoran,” jelas Suryanto.

Disinggung mengenai sulitnya Anggota DPRD Kabupaten Paser berkomunikasi dengannya, Suryanto menjelaskan beberapa waktu lalu ponselnya

hilang dan mengganti nomor telepon baru. “HP saya hilang,” akunya.

Terkait adanya penyampaian dalam hearing apabila dinilai gagal mengatasi persoalan air bersih, DPRD tak segan-segan memberikan surat teguran. Hingga nantinya tak menutup kemungkinan dirinya lengser dari direktur Perumda Tirta Kandilo, ia tak mengkhawatirkan hal tersebut.

“Itu sudah risiko pekerjaan, risiko jabatan,” tutup Suryanto. (bs)

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari

DANDIM CUP KEJURPROV SERI 3 2023

KOLONEL CZI EKO SUPRI SETIAWAN, S.SOS., M.HAN
DANDIM 0901/SAMARINDA

H. SYAHRIL SARAPING
KETUA HDCI KALTIM

26-27 AGUSTUS 2023
EX BANDARA TEMINDUNG SAMARINDA

DRAG BIKE & SAFETY RIDING

JALAN SANTAI

DOOR PRIZE !!!

SAFETY RIDING, LOMBA DRAG BIKE, TALKSHOW KEBEN, LOMBA MODERN DANCE, LIVE MUSIC, LOMBA IT AGUSTUS, LOMBA FASHION SHOW, JALAN SANTAI, KULINER UMRAH

PRESENT BY : NIVIC, BADBOY

SUPPORTED BY : PESAN KAPAL, 75

MEDIA PARTNER : MEDIA KALTIM, KATUJU

INFORMASI DAN PENDAFTARAN :
EZA : +62 822-5560-6039
MAULIDANI : +62 857-5134-4384
AYA : +62 831-4400-8571

Pertahankan Adipura, Pemkab PPU Rumuskan Cara Kerja dan Kebutuhan Anggaran

PPU - Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) berupaya untuk mempertahankan Piala Adipura pada 2023 ini. Salah satunya dengan mengonsolidasikan penanganan sampah pada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab PPU.

Pada 2022 lalu, PPU akhirnya kembali menerima penghargaan Piala Adipura kategori kota kecil. Berkat beberapa peningkatan pengelolaan sampah yang baik di seluruh lingkungan Benuo Taka.

Adapun saat ini juga tengah memasuki tahapan penilaian Adipura untuk tahun ini. Untuk mempertahankan itu, ada beberapa indikator yang perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU, Tita Deritayati menuturkan untuk melawati penilaian itu tidak mudah. Ada beberapa poin penting dari berbagai aspek dan faktor pendukung yang mesti terpenuhi.

"Memang tidak mudah, dan saya sedikit pesimis dengan kondisi keterbatasan anggaran yang ada," ungkap dia, Selasa (15/8/2023).

Ada 2 poin penting dalam penilaian Adipura. Yaitu, pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Soal pengurangan sampah ini yakni berkaitan dengan mengubah perilaku masyarakat. Kemudian juga mengajak untuk membuat bank sampah dengan beberapa kelompok masyarakat yang peduli lingkungan.

"Karena memang salah satu faktor penentunya itu adalah pengolahan sampah," ujar Tita.

Sementara untuk penanganan sampah, berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, fokusnya ialah untuk menekan timbunan sampah minimal 60 persen, dari seluruh masyarakat di Benuo Taka.

"Timbunan sampah bila dilihat dari perhitungan, masih belum mencapai apa yang menjadi target 60 persen. Layanan yang ada di PPU masih di bawah 50 persen," bebarnya.

Tita mengungkapkan untuk memenuhi penilaian itu, membutuhkan komitmen bersama. Khususnya dari tataran pemerintahan dengan seluruh perangkat yang ada.

Untuk diketahui, baru-baru ini Setkab PPU menggelar rapat koordinasi lintas OPD, khusus untuk mempersiapkan pemantauan penilaian Adipura 2023. Dari pertemuan itu, dukungan untuk menyelesaikan berbagai kendala yang harus dibenahi bisa teruraikan. Utamanya soal sarana dan prasarana pendukung yang berkaitan dengan sampah.

"Namun tahun ini, kami tetap optimis. Dengan dukungan Bapak Bupati dan seluruh SKPD yang ada, serta masyarakat Kabupaten PPU, tentunya Piala Adipura 2023 masih dapat kita raih," kata Tita.

Dalam rapat tersebut, seluruh OPD yang berkaitan dengan kedua poin tadi wajib turut langsung membantu. Bukan hanya memberikan dukungan, tapi membantu langsung menyiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam proses penilaian Adipura tahun ini.

"Memang ada istilah bahwa mempertahankan itu lebih susah dari pada meraih. Kita tentu harus optimis bisa mempertahankan Piala Adipura di tahun 2022 lalu. Tetapi tentunya harus dibarengi dengan kerja keras dan perjuangan kita semua untuk mewujudkan itu," kata Bupati PPU Hamdam Pongrewa.

Melalui rapat ini pula, ia mengonsolidasikan seluruh perangkat menjadi tim yang solid. Merumuskan berbagai strategi cara kerja yang dapat dijalankan, beserta anggaran yang dibutuhkan.

"Saya berharap Piala Adipura ini bisa Kita dapatkan kembali. Termasuk support pendanaannya silakan dirumuskan dengan baik. Sehingga tujuan penilaian Adipura ini tidak boleh dikatakan tidak ada anggarannya lagi," tutup Hamdam. (sbk)

Pewarta : Nur Robbi

Editor : Nicha Ratnasari





ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Penandatanganan berita acara penetapan Prolegda PPU 2023 dalam Rapat Paripurna, Sabtu (12/8/2023) lalu.

7 Prolegda PPU 2023 Ditetapkan, Penguatan Regulasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

PPU - Eksekutif dan legislatif telah menyepakati rancangan peraturan daerah (Raperda) yang masuk dalam program legislatif daerah (prolegda) 2023. Mayoritas Raperda yang akan dilahirkan tahun ini berkaitan dengan penguatan regulasi penyelenggaraan pelayanan pemerintah terhadap publik.

Kepala Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD PPU, Sudirman menyebutkan tahun ini ada 7 Raperda yang telah ditetapkan. Ada 3 di antaranya merupakan usulan dari DPRD PPU dan 4 sisanya merupakan usulan dari Pemkab PPU.

"Terdapat 7 Perda yang akan diajukan agar dapat dibahas dalam Pansus (panitia khusus). Yaitu 3 perda insiatif DPRD dan 4 dari Pemerintah Kabupaten," ungkap Sudirman pada Selasa (15/8/2023).

Dari insiatif legislatif ialah Raperda tentang Perlindungan dan Pem-

berdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam. Lalu Raperda tentang Zonasi Nilai Tanah di Kabupaten PPU. Kemudian Raperda tentang Penanaman Modal.

"Awalnya kami targetkan ada 10 Raperda yang akan masuk ke Prolegda. 4 dari DPRD dan 6 dari Pemkab PPU. Tapi dari hasil rapat, disepakati hanya 7," sebutnya.

Sementara insiatif dari Pemkab PPU, Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; Raperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah; Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pembentukan Perangkat Daerah.

"Selanjutnya kami bentuk 2 pansus, dengan masa kerja 3 bulan, dengan opsi perpanjangan. Kami targetkan selesai dalam waktu secepatnya," tegas Sudirman.

Untuk diketahui, kesepakatan Prolegda ini telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna, Sabtu (12/8/2023) lalu. Baik Pemkab PPU dan seluruh Fraksi di DPRD PPU telah menyampaikannya dalam agenda tersebut.

Bupati PPU Hamdam Pongrewa mengungkapkan secara umum Raperda yang akan dibahas tahun ini memiliki urgensi untuk segera diterbitkan regulasinya. Salah satunya soal Raperda ini mengatur perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Raperda ini berkaitan erat dengan peningkatan pelayanan terkait perizinan dan penanaman modal. Pun atas terbitnya PP 6/2021 tentang penyelenggaraan perizinan dan perizinan berusaha, yang menjadi rujukan penyelenggaraan perizinan secara nasional di daerah.

“Peraturan ini memberikan arah lebih lanjut tentang tugas dan fungsi dari DPMPSTP. Terutama bab ketentuan penutup dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan pemerintah tersebut,” jelasnya.

Adapun ketentuan Pasal 18 dan pasal 40 dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Menjelaskan tentang variable dan tata cara skoring untuk menetapkan tipologi bagi perangkat daerah di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

“Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat 1 dalam peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. DPMPSTP seharusnya tidak lagi berbentuk tipologi. Sehingga tipologi pada perangkat daerah tersebut harus dihapus karena sudah tidak relevan dengan peraturan yang ada,” lanjutnya.

Ada lagi Raperda tentang penyelenggaraan penanggulangan ben-

cana, Hamdam menerangkan perlunya penguatan manajemen yang berdasar pada pelaksanaan UU 24/2007 tentang penanggulangan bencana dan PP 21/2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan peraturan kebencanaan lainnya.

“Hal ini dibutuhkan mengingat wilayah Kabupaten PPU secara geografis, hidrologis dan klimatologis sangat memungkinkan terjadi berbagai bencana,” ucapnya.

Kondisi alam seperti itu dapat menimbulkan risiko bencana yang tinggi. Hamdam menyebutkan pula sebagian besar wilayah PPU berada dalam kawasan rawan bencana.

Memang benar, mulai dari ancaman banjir, kekeringan, gelombang pasang atau abrasi, tanah longsor, gempa. Termasuk pula kebakaran hutan dan lahan serta angin puting beliung bahkan termasuk tsunami.

“Walaupun bencana berskala besar tersebut mungkin masih dianggap jauh dari terjadinya di daerah kita, namun potensi bencana apap-

un akan selalu ada. Sehingga kesiapsiagaan adalah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk melindungi warganya secara maksimal untuk menghindari resiko yang lebih besar terhadap kejadian bencana,” bebarnya.

Sementara untuk Raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan, menurutnya regulasi ini disusun dengan didasarkan pada pemahaman akan permasalahan yang dihadapi. Bahwa penyelenggaraan perpustakaan belum berjalan maksimal, karena banyak hal yang berhubungan dengan masalah dukungan regulasi.

“Semoga Raperda tersebut dapat menjadi pedoman hukum, yang memberikan manfaat langsung atau tidak langsung dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, pembangunan serta pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten PPU,” tutup Hamdam. (sbk)

Pewarta : Nur Robbi

Editor : Nicha Ratnasari





SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN

* TOYOTA MOTOR OIL

Khusus Taxi Online & Travel

GUARANTEE PALING HEMAT GUARANTEE

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088




Drusan Toyota lebih mudah!



Mantan Ketua Bawaslu Kaltim Saipul

Kekosongan Jabatan Bawaslu Kabupaten Kota Se-Kaltim: Saipul Soroti Ketidakprofesionalan Bawaslu RI

SAMARINDA - Mantan Ketua Bawaslu Kaltim Saipul, menyoroti kekosongan jabatan Bawaslu Kabupaten Kota se-Kaltim yang saat ini masih menunggu pengumuman hasil seleksi Bawaslu Kabupaten Kota dari Bawaslu RI. Menurutnya, kondisi ini seharusnya bisa diantisipasi jauh-jauh hari jika Bawaslu memiliki perencanaan yang baik.

"Ada dua kali penundaan yang sudah ditetapkan sebelumnya yang ada di pedoman. Ini menunjukkan kurang maksimalnya perencanaan dan proses tahapan seleksi," ujar Saipul yang pernah menjabat ketua Bawaslu Kaltim dua periode ini.

Ia menambahkan bahwa penetapan anggota Bawaslu Kabupaten Kota seharusnya diberikan waktu sebelum berakhirnya periode 2018-2023, agar tidak terjadi kekosongan jabatan. Saipul juga menekankan pentingnya Bawaslu hadir dalam mengawasi tahapan pemilu, terutama saat KPU menuju penetapan DCS.

"Kalau seperti ini prosesnya kembalikan saja Bawaslu ke adhoc. Ini

kan Pemilu 5 tahunan, seharusnya Bawaslu profesional dalam merencanakan," tegasnya. "Saya bicara seperti ini karena pernah mengalami ketika di Bawaslu masih adhoc sampai Bawaslu ditetapkan permanen," tambahnya.

Mengenai pengambilalihan wewenang oleh Bawaslu Kaltim, Saipul menilai ada perbedaan persepsi Bawaslu dalam penggunaan ketentuan Pasal 99 huruf (e) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Penggunaan pasal 99 ini seharusnya dilakukan ketika terjadi keadaan tertentu, bukan dalam kondisi saat ini," tegasnya. Ia mencontohkan keadaan tertentu yang dimaksud ketika terjadi penonaktifan anggota Bawaslu lantaran menghadapi sidang etik.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Dermanto, mengungkapkan bahwa Bawaslu Kaltim telah mengambil alih sementara wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten dan Kota.

Keputusan ini diambil lantaran

masa jabatan Bawaslu Kabupaten dan Kota untuk periode 2018-2023 telah berakhir pada 14 Agustus 2023, sedangkan pejabat penerusnya untuk periode 2023-2028 belum diumumkan dan dilantik.

Hari Dermanto juga menjelaskan bahwa saat ini sudah memasuki dua tahapan pemilu di tingkat Kabupaten dan Kota, yaitu penyusunan dan penetapan DCS DPRD Kabupaten/Kota dan penyusunan DPT serta DPK.

"Meningkat Bawaslu Kabupaten/Kota periode 2023-2028 belum diumumkan dan belum dilantik, maka Bawaslu Kaltim mengambil alih pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten dan Kota," ucap Hari.

Pengambilalihan wewenang ini, menurut Hari, sudah sesuai dengan UU yang berlaku. Ia juga menegaskan kepada koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten dan Kota agar tetap melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan serta berkoordinasi dengan Bawaslu Kaltim. **(han)**



SR saat diamankan petugas Lapas Samarinda.

Botol Lotion Isi Sabu Gagal Masuk Lapas Samarinda

SAMARINDA - Seorang pria berinisial SR (34) diamankan petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Samarinda lantaran kedapatan hendak menyelundupkan narkoba jenis sabu seberat 15 gram untuk warga binaan di dalam Lapas. Penyelundupan itu berhasil digagalkan petugas pada Senin (14/8/2023).

Untuk mengelabui petugas, kristal mematkan itu disembunyikan oleh SR di dalam sebuah botol lotion dan bak sampah.

"Kita dapati sabu kurang lebih 15 gram yang disembunyikan pelaku di dalam lotion 2 bungkus, dan diselipkan di bak sampah satu bungkus," ucap Kalapas Kelas IIA Samarinda Hudi Ismono, Selasa (15/8/2023).

Hudi menceritakan, awalnya SR memang datang untuk menitipkan makanan dan barang guna diberikan kepada salah seorang warga binaan

berinisial RD.

Sesampainya di meja pemeriksaan, SR sempat menunjukkan gelagat mencurigakan. Ia gugup seperti ada yang ia sembunyikan. Melihat itu, petugas pengamanan kemudian semakin curiga dan melakukan pemeriksaan terhadap barang titipan SR.

"Barang-barang dan makanan itu rencananya ditujukan ke warga binaan berinisial RD," terangnya.

Benar saja, petugas menemukan narkoba jenis sabu yang disembunyikan di dalam botol lotion. Tak hanya itu, petugas juga mendapati sabu di bagian bawah bak sampah yang dibawa SR.

"Modusnya, sabu itu ditaruh di dalam botol dan diisi cream lotion, dan sabu yang lain disembunyikan di celah-celah bak sampah yang ada di bawahnya," ungkapny.

Dari temuan itu, petugas kemudian

mengamankan SR untuk selanjutnya diserahkan ke Polresta Samarinda guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara warga binaan RD langsung dipindahkan petugas Lapas ke ruang sel isolasi.

"Barang bukti dan pelaku kita serahkan ke pihak berwajib, untuk warga binaan yang terlibat kita kirim ke sel isolasi," bebernya.

Dikonfirmasi terpisah, Kanit Lidik Satreskoba Polresta Samarinda Iptu Purwanto mengatakan dalam hal ini SR hanya bertugas sebagai kurir. Dia menyebut SR mendapatkan upah Rp 1 juta dari salah seorang yang berada di luar Lapas.

"Dia diupah Rp 1 juta sekali antar sabu itu," jelas Purwanto. (vic)

Pewarta : Viqih Jati Kusuma
Editor : Nicha Ratnasari

Bawaslu Kaltim Ambil Alih Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota

SAMARINDA - Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur (Kaltim) Hari Dermanto mengungkapkan bahwa Bawaslu Kaltim melakukan pengambilalihan sementara wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten dan Kota. Hal tersebut disampaikan melalui keterabgab persnya pada Selasa (15/8/2023).

Keputusan ini dilakukan, lantaran masa jabatan Bawaslu Kabupaten dan Kota Se- Kaltim untuk periode 2018- 2023 telah berakhir terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2023 lalu. Sedangkan untuk pejabat penerus Bawaslu Kabupaten dan Kota periode 2023 - 2028 belum diumumkan dan belum dilantik sampai siaran pers ini dibuat.

Padahal saat ini persiapan sudah memasuki 2 tahapan yang sedang berlangsung di tingkat Kabupaten dan Kota. "Yang pertama adalah tahapan penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/ Kota yang dimulai pada tanggal 12-18 Agustus 2023. Yang kedua adalah penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dimulai tanggal 26 April 2023- 7 Februari 2024," ungkap Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengawasan terhadap kedua tahapan tersebut harus tetap berlangsung.

"Mengingat Bawaslu Kabupaten/ Kota periode 2023-2028 belum diumumkan dan belum dilantik maka Bawaslu Kaltim mengambil alih pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten dan Kota sampai dengan dilantiknya pejabat Bawaslu Kabupaten/ Kota terpilih," ujarnya.

Pengambilalihan wewenang Bawaslu Kabupaten dan Kota oleh Bawaslu Kaltim tersebut sudah sesuai dengan UU yang berlaku.

"Pengambilalihan tugas, wewenang dan kewajiban oleh Bawaslu Kalimantan Timur ini sesuai dengan ketentuan Pasal 99 huruf (e) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum," terangnya.

Dalam surat tersebut Ketua Bawaslu juga menegaskan kepada koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten dan Kota, agar tetap melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan sebagaimana adanya dan memfasilitasi semua tahapan pengawasan yang sedang berjalan, serta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten dan Kota Se- Kaltim berkoordinasi kepada Bawaslu Kaltim. (han)

Pewartu : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto, S.H., M.H



HANAFI

Kiri Sekretaris Disdukcapil HM Subhan dan kanan Kepala BPBD Samarinda Suwarso.

Disdukcapil dan BPBD Samarinda Teken PKS Pemanfaatan Data bagi Korban Bencana

SAMARINDA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Samarinda bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda meneken Perjanjian Kerjasama (PKS) pada Selasa (15/8/2023) digedung Disdukcapil yang berada di jalan Basuki Rahmat Samarinda Kota.

Usai penandatanganan PKS, Kepala BPBD Samarinda Suwarso, mengatakan tujuan PKS tersebut adalah mempermudah bagi masyarakat untuk mengakses data kependudukan yang terdampak bencana alam baik itu kebakaran, banjir dan bencana lainnya.

“Mempermudah masyarakat dalam pemanfaatan data atau akses data bagi warga yang berdomisili daerah yang rawan bencana yang sedang atau tinggi Termasuk korban korban bencana,” katanya.

Kerja sama yang dilakukan oleh Disdukcapil Samarinda dan BPBD Samarinda juga sebagai upaya

untuk memenuhi kebutuhan pelayanan minimum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

“Kita coba penuh itu, itu juga upaya untuk meningkatkan index ketahanan daerah kota Samarinda,” ungkapnya. Suwarso juga berharap dengan kerjasama ini index ketahanan kota Samarinda terhadap bencana makin tinggi.

“Mudah-mudahan setelah kita laksanakan kerjasama ini index Ketahanan kota Samarinda juga makin tinggi masyarakatnya juga semakin tangguh,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Disdukcapil Samarinda HM Subhan berharap kerjasama ini bisa menjadi contoh bagi pemda-pemda lainnya. “Semoga kerjasama ini menjadi contoh bagi Pemda lainnya,” ujarnya.

Dia juga mengatakan ini adalah target dari pemerintah pusat agar setiap daerah ada kerja sama antar lembaga daerah seperti yang dilaku-

kan oleh Disdukcapil Samarinda dan BPBD Samarinda ini dengan tertulis di atas kertas.

“Ini lembaga yang pertama melakukan kerjasama dengan kita (Disdukcapil red), nanti akan ada lembaga lembaga yg lainnya,” ungkapnya.

Adapun adanya kerja sama ini bisa menjadi berkah bagi kedua lembaga pemerintah daerah tersebut. “Semoga ada berkah bagi penandatanganan kerja sama ini” katanya.

Dengan ditandatanganinya PKS ini, warga yang terdampak bencana akan diberikan kemudahan untuk mengurus dokumen kependudukannya yang hilang. Terutama masyarakat yang sudah membuat KTP elektronik otomatis datanya sudah ada dalam database. Inovasi dan kerjasama ini dilakukan guna meminimalisir masyarakat yang menjadi korban bencana alam. (han)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Ketua PWI Kaltim, Endro S Efendi saat menyampaikan materi.

PP Nabil Husein dan PWI Beri Pelatihan Jurnalistik Bagi Santri Ponpes

SAMARINDA – Pondok Pesantren (PP) Nabil Husein Samarinda bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim memberikan pelatihan jurnalistik santri Se-Kota Samarinda.

Kegiatan tersebut berlangsung di lantai 3 Gadung Kantor PP Nabil Husein di Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Selasa (15/08/2023).

Pelatihan jurnalistik diikuti puluhan Santri MTs, SMP, SMA, dan MA dari beberapa pondok pesantren di Samarinda.

Kegiatan diisi narasumber Ketua PWI Kaltim Endro S Efendi, Pimpred Samarinda Pos Abdurrahman Amin dan Ketua IKA PP Nabil Husein Samarinda Abdul Rahman.

"Saya ucapkan terima kasih kepada ketua beserta pengurus PWI Kaltim yang telah memberikan ilmunya dan semoga nantinya bermanfaat bagi semua peserta," kata Pimpinan Pondok Pesantren Nabil Husein Samarinda, KH Nasikin di sela-sela acara.

Nasikin memotivasi santri untuk meningkatkan budaya menulis dan literasi. Menulis merupakan tradisi yang telah dilakukan oleh para ulama besar sehingga wajib diteruskan oleh para santri di Pesantren.

"Yang harus diingat, akhlak lebih

utama dari pada ilmu. Jadi setelah mendapatkan ilmu ini nantinya jangan sombong dan tetap menjaga adab dan akhlak," terangnya.

Sementara itu, Ketua PWI Kaltim Endro S Efendi menjelaskan fungsi media massa sebagai pilar keempat demokrasi serta penyebar informasi, media pendidikan, media hiburan dan kontrol sosial.

Menurutnya, modal menjadi penulis di media harus banyak membaca dan rajin menulis.

"Kegiatan dan pertemuan dengan PP Nabil Husein Samarinda ini adalah yang kedua. Sebelumnya Ustaz Nasikin kami undang menjadi narasumber dalam Uji Kompetensi Wartawan beberapa waktu lalu," sebutnya.

Endro menambahkan, pelatihan jurnalistik santri menjadi kegiatan yang pertama selama kepengurusan PWI kaltim selama dirinya menjadi ketua PWI Kaltim.

"Kita berharap ke depan kegiatan tetap berlanjut," harapnya.

Para santri dan santriwati ternyata sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Setiap selesai sesi yang disampaikan narasumber, berbagai pertanyaan pun terlontar baik dari santri Nabil Husein maupun santri dan pondok pesantren lainnya.

Usai kegiatan ini, diharapkan pondok pesantren di Samarinda bisa sinergi dan segera memiliki media siber yang bisa dimanfaatkan bersama. (rls)

Editor : Nicha Ratnasari



Lebih Premium, New Honda Vario 160 Hadir dengan Varian Warna Baru

SAMARINDA – PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan penyegaran pada New Honda Vario 160 melalui pilihan varian warna terbaru pada tipe CBS-ISS dengan gaya premium sporty, sehingga membuat pengendara makin percaya diri. Penyegaran juga disematkan pada balutan stripe dan pilihan warna terbaru pada semua varian skutik besar Honda ini.

Pilihan warna premium dihadirkan pada tipe CBS-ISS, New Honda Vario yakni Grande Matte White dan Grande Matte Black. Dengan dipadukan 3D emblem dan velg berwarna burnt titanium menambah kesan mewah pada tipe ini. Penyematan stripe baru yang memadukan aksesoris desain minimalis yang kuat juga diaplikasikan pada tipe CBS-ISS dengan pilihan warna sporty yakni Active Matte Red dan Active Matte Black.

Menurut penjelasan dari Direktur Marketing AHM Octavianus Dwi, desain dari New Honda Vario 160 ini mengusung model yang semakin premium dan sporty agar pengendara memiliki kesan bangga saat menggunakan dalam menemani aktivitas keseharian. Tidak ketinggalan, tipe ini juga didukung dengan teknologi dan fitur yang lengkap serta canggih sebagai menunjang gaya khas masa kini.

“Penyegaran pada New Honda Vario 160 menjadi langkah dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan para pecinta skutik besar Honda melalui pilihan yang semakin beragam. Perubahan ini tetap mempertahankan gaya desain premium sporty yang diminati konsumen skutik besar,” ujar Octa.

New Honda Vario 160 hadir dengan desain body motor yang besar dan performa tinggi serta beragam teknologi fitur canggih. Mengusung mesin generasi terbaru dengan kapasitas 160cc 4 katup enhanced Smart Power Plus (eSP+) berpendingin cairan yang mampu mengurangi gesekan. Sehingga, mesin terbaru ini dapat menghasilkan tenaga maksimal hingga 11,3 kW pada 8.500 rpm



dengan torsi puncak 13,8 Nm pada 7.000 rpm. Sensasi bertenaga yang dihadirkan skutik premium sporty ini pun semakin mewujudkan kebanggaan dan kesenangan berkendara.

New Honda Vario 160 dipasarkan dengan harga on the road (OTR) Samarinda pada tipe ABS adalah Rp. 32.380.000. Harga tipe CBS-ISS dengan warna premium yakni Grande

Matte White dan Grande Matte Black adalah Rp. 29.500.000, sedangkan tipe CBS-ISS warna sporty yakni Active Matte Red dan Active Matte Black dipasarkan dengan harga Rp. 32.380.000. (acc)

Pewarta : Annisa
Editor : Nicha Ratnasari





RAMAIKAN & IKUTI EVENT NYA YUK

MEMAKAI KUPON DIGITAL RP.5 RIBU

ACARA PUNCAK HUT MEDIA KALTIM :

27 AGUSTUS 2023

JALAN SEHAT



LAPANGAN EX. TEMINDUNG SAMARINDA
MULAI PUKUL 06.00 WITA

INFORMASI :
+62 821-5783-0863
05348943982

